ISSN: 2809 - 6045 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026

PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDES MELALUI ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES MARSAHI TAHI, BUMDES HUTA BOLON MANDIRI DAN BUMDES BERKAH SIALANGUAN JAYA

Lamria Sagala[1)], Dimita H.P. Purba[2)], Farida Sagala[3)], Mitha C. Ginting[4)], Duma Megaria Elisabeth[5)], Septony B. Siahaan[6)], Thomas Sumarsan Goh[7)], Apriani M. Sibarani[8)], Ivo Maelina Silitonga[9)], Rike Yolanda Panjaitan[10)], Januardi Mesakh[11)], Duma Rahel Situmorang[12)], Mulatua P. Silalahi[13)], Tri Dharma Sipayung[14)], Gracesiella Y. Simanjuntak[15)], Merry Anna Napitupulu[16)], Arthur Simanjuntak[17)*], Rimky M. P. Simanjuntak[18)], Yosephine N. Sembiring[19)], James Gowasa[20)], Vany Simanjuntak[21)], Erika[22)]

[1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),13),14),15),16),17),18),19)]Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
[20),21)]Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
[22)]Dosen STIE Profesional Manajemen College Indonesia

*Correspondence email: as_smjt@rocketmail.com

Abstract

Accountable management of village-owned enterprises (BUMDes) requires managers who can assess the feasibility of a business unit before it is launched and who can record and report financial transactions in an orderly way. However, some BUMDes managers still have limited understanding of business feasibility aspects and criteria, the basic accounting equation, journal preparation, and the presentation of financial statements. This community service activity aimed to strengthen the capacity of the managers of BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, and BUMDes Berkah Sialanguan Jaya in Samosir Regency through mentoring in business feasibility analysis and financial statement preparation. The activity was held face to face in Pangururan and was attended by 68 *participants. The stages included coordination, material presentation, a review of basic accounting, simulations of feasibility analysis and financial statement preparation, discussion, and evaluation. The results showed improved participant understanding of feasibility aspects, investment feasibility criteria, transaction recording, and financial statement presentation. Continued mentoring and periodic monitoring are recommended so that these practices are applied consistently.*
Keywords: BUMDes, Business Feasibility, Financial Statements, Mentoring

Abstrak

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akuntabel menuntut kemampuan pengelola dalam menilai kelayakan unit usaha sebelum dijalankan serta mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara tertib. Namun, sebagian pengelola BUMDes masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aspek dan kriteria kelayakan usaha, persamaan dasar akuntansi, penyusunan jurnal, dan penyajian laporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, dan BUMDes Berkah Sialanguan Jaya di Kabupaten Samosir melalui pendampingan analisis kelayakan usaha dan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Pangururan dan diikuti oleh 68 orang peserta. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi, penyampaian materi, review akuntansi dasar, simulasi analisis kelayakan usaha dan penyusunan laporan keuangan, diskusi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek kelayakan usaha, kriteria

kelayakan investasi, pencatatan transaksi, dan penyajian laporan keuangan. Pendampingan lanjutan dan monitoring berkala direkomendasikan agar praktik tersebut diterapkan secara konsisten.
Kata Kunci: BUMDes, Kelayakan Usaha, Laporan Keuangan, Pendampingan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset dan potensi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur BUM Desa mulai dari pendirian, organisasi, modal, aset, pengadaan barang/jasa, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, hingga pembinaan dan pengembangannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Landasan tata kelola desa juga diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, BUMDes dituntut tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga menyelenggarakan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan secara tertib.

Dua kemampuan pengelola menjadi penentu keberlanjutan BUMDes. Pertama, kemampuan menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan. Penyertaan modal desa kepada BUM Desa sebagaimana dirujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerlukan proses analisis kelayakan (Kementerian Dalam Negeri, 2018; Yuliani et al., 2022). Kajian kelayakan usaha pada BUMDes lazimnya menggunakan kriteria investasi seperti Net Present Value (NPV), Net B/C ratio, Internal Rate of Return (IRR), dan periode balik modal; usaha dinilai layak apabila NPV bernilai positif, Net B/C lebih dari satu, IRR melebihi tingkat diskonto, dan modal kembali sebelum umur proyek berakhir (Jefri et al., 2021; Wardana et al., 2021).

Kedua, kemampuan mencatat dan melaporkan keuangan. Beberapa kegiatan pengabdian melaporkan bahwa pengelola BUMDes sering terkendala latar belakang pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan akses pelatihan sehingga pencatatan belum sesuai standar (Monoarfa et al., 2023). Pendampingan bertahap, mulai dari identifikasi kondisi BUMDes, peningkatan literasi pengelola, hingga praktik penyusunan laporan, terbukti dapat menghasilkan laporan keuangan yang kemudian disampaikan dalam musyawarah desa (Nurhidayati et al., 2023). Pada aspek kelayakan usaha, pendampingan berbasis modul dan perhitungan Excel mampu meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes (Wahyudi et al., 2022), sedangkan penggabungan materi tata kelola, laporan keuangan, dan kajian kelayakan menunjukkan sekitar 80% peserta memahami materi yang diberikan (Yuliani et al., 2022).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembekalan manajemen usaha bagi pengelola BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, dan BUMDes Berkah Sialanguan Jaya di Pangururan, Kabupaten Samosir. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dalam menganalisis kelayakan usaha dan menyusun laporan keuangan, sehingga keputusan usaha dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes dapat dilakukan secara lebih terencana, transparan, dan akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA

BUMDes dan Tata Kelola Usaha Desa

BUMDes didirikan untuk mengelola potensi dan aset desa agar menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa dan masyarakatnya. Pengaturan BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

mencakup pendirian, organisasi, modal, aset, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, serta pembinaan dan pengembangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Cakupan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes dikelola sebagai badan usaha yang memerlukan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kegiatan sosial atau administratif.

Prinsip pengelolaan BUMDes yang lazim disampaikan dalam pelatihan pengelola meliputi partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Yuliani dkk., 2022). Prinsip - prinsip ini hanya dapat diwujudkan apabila pengelola memiliki kemampuan menyusun rencana usaha yang realistis dan menyajikan informasi keuangan yang tertib. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola perlu menyasar dua titik kritis: sebelum usaha dijalankan (kajian kelayakan) dan selama serta sesudah usaha berjalan (pencatatan dan pelaporan)

Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha adalah kajian untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan berdasarkan berbagai aspek, sehingga risiko kerugian dapat diperkecil dan perencanaan serta pengendalian menjadi lebih mudah (Wahyudi et al., 2022). Pada pelatihan bagi pengelola BUMDes, aspek yang dikaji umumnya meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan, aspek lingkungan usaha, dan aspek hukum (Yuliani et al., 2022). Aspek pasar menilai ada tidaknya konsumen, pesaing, dan peluang penjualan; aspek teknis menilai ketersediaan bahan, peralatan, dan tenaga kerja; aspek hukum menilai kesesuaian usaha dengan ketentuan yang berlaku; sedangkan aspek keuangan menilai kebutuhan modal, biaya, dan manfaat usaha.

Pada aspek keuangan, kelayakan dinilai dengan beberapa kriteria investasi. Net Present Value (NPV) adalah selisih antara jumlah nilai kini arus kas bersih dan investasi awal; usaha layak apabila NPV bernilai positif. Net B/C adalah perbandingan nilai kini manfaat bersih positif terhadap nilai kini biaya bersih; usaha layak apabila nilainya lebih dari satu. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol; usaha layak apabila IRR melebihi tingkat diskonto yang ditetapkan. Periode balik modal (payback period) adalah lama waktu yang diperlukan agar akumulasi arus kas menutup investasi awal; usaha layak apabila modal kembali sebelum umur proyek berakhir (Jefri et al., 2021; Wardana et al., 2021). Selain itu, analisis titik impas (break-even point) menunjukkan jumlah penjualan minimal agar usaha tidak merugi, dan metode periode kembali modal serta titik impas telah digunakan sebagai materi pengantar bagi pengelola BUMDes yang baru mengenal kajian kelayakan (Yuliani et al., 2022)

Laporan Keuangan BUMDes

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi, yaitu proses sistematis yang dimulai dari bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, pengelompokan ke dalam akun, hingga penyajian laporan untuk periode tertentu (Yuliani et al., 2022). Format laporan keuangan BUMDes yang dirujuk dalam kegiatan pelatihan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan arus kas (Yuliani et al., 2022). Pada praktik pendampingan BUMDes, penyusunan laporan keuangan juga dikaitkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) serta pemanfaatan perangkat berbasis teknologi informasi untuk membantu pengelola (Monoarfa et al., 2023).

Hambatan yang sering dijumpai bukan hanya soal teknik pencatatan, tetapi juga sumber daya manusia. Monoarfa et al (2023) melaporkan bahwa BUMDes yang telah beroperasional sejak 2019 belum menyusun laporan keuangan sebagaimana mestinya karena keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi serupa mendorong pelaksanaan pendampingan yang tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada praktik dan penyusunan laporan sesungguhnya, seperti pada BUM Desa Berkah Sae yang akhirnya berhasil menyusun laporan keuangan dalam format Excel dan menyampaikannya melalui musyawarah desa (Nurhidayati et al., 2023).

Pendampingan sebagai Pendekatan Penguatan Kapasitas

Pendampingan dipahami sebagai kegiatan pembimbingan oleh pihak yang memiliki keahlian kepada pihak yang membutuhkan, melalui proses pemberdayaan (Yuliani et al., 2022). Dalam konteks BUMDes, pendampingan yang efektif lazimnya memadukan penyampaian teori, studi kasus, alat bantu praktis seperti modul dan lembar kerja Excel, serta kesempatan berdiskusi (Wahyudi et al., 2022; Yuliani et al., 2022). Kerangka inilah yang dijadikan rujukan dalam merancang kegiatan di Pangururan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan tatap muka di Pangururan, Kabupaten Samosir. Peserta adalah pengelola dan pengurus dari tiga BUMDes mitra, yaitu BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, dan BUMDes Berkah Sialanguan Jaya, dengan jumlah 68 orang. Pelaksana kegiatan adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.

Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan praktik langsung. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi, pendekatan partisipatif melalui diskusi dan tanya jawab mengenai kendala yang dihadapi tiap BUMDes, dan praktik langsung melalui simulasi perhitungan kelayakan serta penyusunan laporan keuangan dari contoh transaksi. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan praktik pendampingan BUMDes yang memadukan penyampaian materi, studi kasus, dan latihan (Nurhidayati et al., 2023; Yuliani et al., 2022).

Tahapan kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, meliputi: (1) koordinasi dengan pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk memetakan kebutuhan; (2) persiapan materi dan contoh kasus; (3) pelaksanaan pembekalan tatap muka yang mencakup pengantar manajemen usaha, aspek kelayakan usaha, dan kriteria kelayakan investasi; (4) review akuntansi dasar dan simulasi kelayakan usaha; serta (5) praktik penyusunan laporan keuangan, diskusi, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap kemampuan peserta mengikuti simulasi, menjawab pertanyaan, dan menyusun contoh perhitungan serta laporan sederhana.



Gambar 1: Skema Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diikuti oleh pengelola dari tiga BUMDes mitra dan berlangsung secara interaktif. Materi yang diberikan meliputi: peran dan tata kelola BUMDes; perencanaan usaha dan analisis potensi desa; aspek-aspek kelayakan usaha (pasar dan pemasaran, teknis, hukum, dan keuangan); kriteria kelayakan investasi berupa periode balik modal, titik impas, NPV, dan Net B/C; persamaan dasar akuntansi dan pengenalan akun; analisis transaksi dan jurnal umum; penyusunan laporan keuangan; serta pengarsipan bukti transaksi.



Gambar 2: Foto bersama peserta Pembekalan Manajemen Usaha UMKM-BUMDes di Pangururan

Pendampingan tatap muka memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kendala secara langsung. Hal ini penting karena latar belakang pendidikan dan pengalaman pengelola BUMDes beragam, sehingga penjelasan perlu diberikan secara bertahap dan disertai contoh yang dekat dengan unit usaha desa.



Gambar 3: Sesi diskusi dan tanya jawab bersama pengelola BUMDes

Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan pertanyaan mengenai cara menentukan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, cara menghitung kapan modal usaha kembali, serta cara mencatat transaksi agar dapat disajikan dalam laporan keuangan. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak hanya bersifat teknis pencatatan, tetapi juga mencakup dasar pengambilan keputusan usaha.



Gambar 4: Foto bersama tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan peserta kegiatan

Capaian Kegiatan Pendampingan

Capaian kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berorientasi pada penguatan keterampilan praktis, bukan sekadar penyampaian materi. Peserta diarahkan memahami keterkaitan antara rencana usaha, kajian kelayakan, bukti transaksi, pencatatan, dan laporan keuangan BUMDes. Ringkasan capaian disajikan pada Tabel 1

Tabel 1
Capaian Kegiatan Pendampingan Analisis Kelayakan Usaha dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

No	Aspek Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Capaian Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Pemahaman tata kelola dan laporan keuangan BUMDes	Penyampaian materi dan diskusi	Peserta memahami fungsi laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban, pengendalian, dan evaluasi usaha BUMDes	Peserta mampu menjelaskan tujuan laporan keuangan BUMDes
2	Aspek kelayakan usaha	Penyampaian materi dan studi kasus	Peserta mengenal aspek pasar dan pemasaran, teknis, hukum, serta keuangan dalam menilai rencana unit usaha	Peserta mampu menyebutkan aspek yang perlu dikaji sebelum unit usaha dijalankan
3	Kriteria kelayakan investasi	Simulasi perhitungan dengan contoh kasus	Peserta mengenal konsep periode balik modal, titik impas, NPV, dan Net B/C	Peserta mampu menghitung contoh sederhana dan menafsirkan hasilnya
4	Akuntansi dasar dan analisis transaksi	Review persamaan akuntansi dan latihan transaksi	Peserta memahami konsep aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban	Peserta mampu mengelompokkan transaksi ke dalam akun yang sesuai

No	Aspek Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Capaian Kegiatan	Indikator Keberhasilan
5	Penyusunan laporan keuangan	Praktik pencatatan dari bukti transaksi hingga laporan	Peserta memahami alur dari bukti transaksi, jurnal, hingga laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas, dan perubahan modal	Peserta mampu menyusun contoh laporan keuangan sederhana
6	Pengarsipan bukti transaksi	Penjelasan dan diskusi	Peserta memahami pentingnya bukti transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban	Peserta mampu mengelompokkan bukti transaksi berdasarkan jenis dan waktu
7	Penguatan tata kelola BUMDes	Diskusi akuntabilitas dan transparansi	Peserta memahami hubungan antara kelayakan usaha, laporan keuangan, dan keberlanjutan BUMDes	Peserta menyadari pentingnya perencanaan usaha dan pelaporan berkala

Berdasarkan Tabel 1, peserta memperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai dua hal pokok: bagaimana menilai kelayakan suatu unit usaha sebelum modal ditanamkan, dan bagaimana menyajikan hasil usaha melalui laporan keuangan. Kedua kemampuan ini saling melengkapi. Kajian kelayakan menghasilkan proyeksi biaya dan manfaat yang menjadi dasar keputusan investasi, sedangkan laporan keuangan menunjukkan realisasi hasil usaha untuk dievaluasi pada periode berikutnya.

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Sebelum kegiatan, sebagian pengelola memahami pencatatan keuangan sebatas kas masuk dan kas keluar, dan penilaian rencana usaha lebih bertumpu pada perkiraan. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa keputusan usaha perlu didukung kajian kelayakan dan bahwa laporan keuangan memerlukan proses pencatatan yang sistematis berdasarkan bukti transaksi. Perbandingan kondisi disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pendampingan

No	Aspek	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Sesudah Kegiatan	Keterangan
1	Penilaian rencana usaha	Keputusan membuka unit usaha lebih banyak didasarkan pada perkiraan dan kebiasaan	Peserta memahami perlunya kajian kelayakan sebelum unit usaha dijalankan	Perlu pendampingan menyusun kajian untuk unit usaha riil masing-masing BUMDes
2	Kriteria kelayakan	Konsep periode balik modal, titik impas, dan NPV belum dikenal secara merata	Peserta mengenal dan mulai mampu menghitung contoh sederhana	Perlu latihan lanjutan dengan data usaha sendiri
3	Akuntansi dasar	Sebagian peserta belum memahami persamaan akuntansi dan klasifikasi akun	Peserta mulai memahami aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban	Perlu contoh transaksi riil BUMDes
4	Penyusunan laporan keuangan	Pencatatan masih berupa catatan kas masuk dan kas keluar	Peserta memahami tahapan dari bukti transaksi hingga laporan keuangan	Diperlukan format laporan yang seragam

No	Aspek	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Sesudah Kegiatan	Keterangan
5	Pengarsipan bukti transaksi	Bukti transaksi belum seluruhnya tertata sistematis	Peserta memahami pengarsipan berdasarkan jenis dan tanggal	Perlu SOP pengarsipan yang sederhana
6	Akuntabilitas pelaporan	Pelaporan lebih dipahami sebagai kewajiban administratif	Peserta memahami laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas dan tata kelola	Perlu evaluasi berkala oleh pemerintah desa dan pembina

Tabel 2 menunjukkan perubahan positif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta. Meskipun demikian, kolom keterangan memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas ini masih perlu diperkuat dengan pendampingan lanjutan menggunakan data usaha masing-masing BUMDes. Hasil ini sejalan dengan temuan kegiatan serupa, yaitu bahwa pelatihan satu kali efektif membangun pemahaman awal, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen pengelola dan konsistensi penerapan (Wahyudi et al., 2022)

Uraian Materi: Perencanaan dan Kelayakan Usaha

Materi kelayakan usaha dimulai dari pemetaan potensi desa. Peserta diajak mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di desa masing-masing, kebutuhan masyarakat, serta jenis usaha yang mungkin dijalankan bersama masyarakat. Peserta kemudian diperkenalkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dengan pertanyaan pemandu sederhana, misalnya apakah di sekitar desa terdapat konsumen yang dituju, apakah ada pesaing pada bidang usaha yang sama, sumber daya apa yang dimiliki BUMDes, dan apakah modal serta keterampilan pengelola mencukupi. Pendekatan pertanyaan pemandu semacam ini juga digunakan pada pelatihan BUMDes lain untuk membantu peserta yang belum terbiasa dengan istilah analisis (Yuliani et al., 2022).

Selanjutnya peserta diperkenalkan pada lima aspek kajian kelayakan, yaitu pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, keuangan, lingkungan usaha, dan hukum. Setiap aspek dibahas dengan contoh unit usaha yang lazim dijumpai di desa, seperti kios sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, jasa penyewaan peralatan, dan usaha pariwisata skala kecil. Penekanan diberikan pada kenyataan bahwa usaha yang tampak menguntungkan dari sisi penjualan belum tentu layak apabila kebutuhan modal, biaya operasional, dan risiko tidak dihitung terlebih dahulu

Simulasi Perhitungan Kelayakan Finansial

Untuk memudahkan pemahaman, peserta mengikuti simulasi menggunakan contoh kasus sederhana yang bersifat ilustratif dan bukan data salah satu BUMDes mitra. Dimisalkan sebuah BUMDes merencanakan unit usaha dengan investasi awal Rp. 60.000.000, arus kas bersih Rp. 20.000.000 per tahun selama lima tahun, dan tingkat diskonto 10% per tahun. Perhitungan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Simulasi Kelayakan Finansial Unit Usaha (Contoh Ilustratif)

Tahun	Arus Kas Bersih (Rp)	Faktor Diskonto 10%	Nilai Kini (Rp)	Akumulasi Arus Kas (Rp)
0	(60.000.000)	1,0000	(60.000.000)	(60.000.000)
1	20.000.000	0,9091	18.181.818	(40.000.000)
2	20.000.000	0,8264	16.528.926	(20.000.000)
3	20.000.000	0,7513	15.026.296	0
4	20.000.000	0,6830	13.660.269	20.000.000

Tahun	Arus Kas Bersih (Rp)	Faktor Diskonto 10%	Nilai Kini (Rp)	Akumulasi Arus Kas (Rp)
5	20.000.000	0,6209	12.418.426	40.000.000
Jumlah nilai kini arus kas tahun 1-5			75.815.735	
NPV (nilai kini dikurangi investasi)			15.815.735	

Dari Tabel 3 peserta menafsirkan hasil sebagai berikut: (1) NPV bernilai positif sebesar Rp.15.815.735, sehingga usaha layak; (2) Net B/C sebesar 1,26 (Rp.75.815.735 dibagi Rp.60.000.000), lebih dari satu; (3) IRR sekitar 19,9%, lebih tinggi daripada tingkat diskonto 10%; dan (4) periode balik modal tepat tiga tahun, lebih pendek daripada umur usaha lima tahun. Keempat kriteria menunjukkan kesimpulan yang sama sehingga rencana usaha tersebut layak dijalankan pada asumsi yang digunakan. Peserta juga diingatkan bahwa kesimpulan sangat bergantung pada asumsi arus kas, sehingga asumsi perlu diuji dengan skenario yang lebih hati-hati.

Sebagai tambahan, peserta berlatih menghitung titik impas. Dimisalkan biaya tetap Rp.3.000.000 per bulan, harga jual Rp.15.000 per unit, dan biaya variabel Rp.9.000 per unit. Kontribusi per unit adalah Rp.6.000 sehingga titik impas tercapai pada penjualan 500 unit per bulan, atau setara penjualan Rp.7.500.000 per bulan. Perhitungan ini membantu pengelola menetapkan target penjualan minimal dan menilai apakah target tersebut realistis bagi pasar desa.

Uraian Materi: Akuntansi Dasar dan Laporan Keuangan

Materi akuntansi dimulai dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal, serta pengenalan akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Peserta kemudian diajak menganalisis pengaruh setiap transaksi terhadap akun dan menentukan sisi debit dan kredit. Pada tahap ini istilah teknis dijelaskan berulang dengan contoh yang dekat dengan kegiatan usaha desa. Tabel 4 menyajikan contoh jurnal umum untuk lima transaksi latihan yang disusun sebagai ilustrasi.

Tabel 4. Contoh Jurnal Umum untuk Transaksi Latihan (Ilustratif)

No	Transaksi	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	Pemerintah desa menyertakan modal secara tunai	Kas / Penyertaan modal desa	60.000.000	60.000.000
2	Membeli peralatan usaha secara tunai	Peralatan / Kas	25.000.000	25.000.000
3	Membeli barang dagangan secara tunai	Persediaan / Kas	10.000.000	10.000.000
4	Penjualan secara tunai	Kas / Pendapatan penjualan	18.000.000	18.000.000
5	Membayar listrik dan upah	Beban operasional / Kas	4.000.000	4.000.000

Tabel 5. Contoh Laporan Laba Rugi (Ilustratif)

Laporan Laba Rugi (Ilustrasi)	Jumlah (Rp)
Pendapatan penjualan	18.000.000
Harga pokok barang yang terjual (sebagian persediaan Rp7.000.000)	(7.000.000)
Laba kotor	11.000.000

Laporan Laba Rugi (Ilustrasi)	Jumlah (Rp)
Beban operasional (listrik dan upah)	(4.000.000)
Laba bersih	7.000.000

Tabel 6. Contoh Laporan Posisi Keuangan (Ilustratif)

Laporan Posisi Keuangan (Ilustrasi)	Jumlah (Rp)
Kas (60.000.000 - 25.000.000 - 10.000.000 + 18.000.000 - 4.000.000)	39.000.000
Persediaan (10.000.000 - 7.000.000)	3.000.000
Peralatan (tanpa penyusutan, disederhanakan)	25.000.000
Jumlah aset	67.000.000
Penyertaan modal desa	60.000.000
Laba periode berjalan	7.000.000
Jumlah modal (kewajiban nihil)	67.000.000

Dari lima transaksi tersebut peserta menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sederhana (Tabel 5 dan Tabel 6). Latihan ini memperlihatkan bahwa jumlah aset selalu sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal, dan bahwa laba periode berjalan menambah modal. Peserta juga diperkenalkan pada laporan arus kas dan laporan perubahan modal sebagai pelengkap, sesuai komponen laporan keuangan BUMDes yang dirujuk dalam pelatihan serupa (Yuliani et al., 2022). Contoh disederhanakan; penyusutan, kewajiban, dan transaksi kredit dibahas sebagai materi lanjutan.

Uraian Materi: Pengarsipan dan Pelaporan

Materi terakhir membahas pengarsipan bukti transaksi, seperti kuitansi, nota, faktur, dan bukti setoran. Peserta diajak mengelompokkan bukti berdasarkan jenis dan tanggal, memberi nomor, dan menyimpannya sehingga dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Pengarsipan dikaitkan langsung dengan akuntabilitas: laporan keuangan yang tidak didukung bukti akan sulit dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa maupun pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya menempatkan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai tahapan yang berurutan (Kementerian Dalam Negeri, 2018)

Pembahasan Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta cenderung lebih mudah memahami konsep ketika disajikan melalui angka sederhana yang dikerjakan bersama. Simulasi pada Tabel 3 sampai Tabel 6, misalnya, membantu peserta melihat bahwa keputusan investasi dan laporan keuangan bukanlah dua hal yang terpisah: kajian kelayakan menghasilkan proyeksi arus kas, sedangkan pencatatan menghasilkan data realisasi yang dapat dibandingkan dengan proyeksi tersebut. Pola ini sejalan dengan praktik pendampingan yang menggunakan modul dan lembar perhitungan Excel agar pengelola dapat mengulang perhitungan sendiri setelah kegiatan (Wahyudi et al., 2022).

Temuan bahwa peserta masih memerlukan latihan dengan data riil juga konsisten dengan laporan kegiatan lain. Pada BUMDESA Berkah Bersama, misalnya, sekitar 80% peserta dinilai memahami materi tata kelola, pengelolaan keuangan, dan studi kelayakan melalui asesmen berupa tanya jawab dan simulasi, tetapi penerapan pada usaha nyata tetap menjadi tahap berikutnya (Yuliani et al., 2022). Dengan demikian, kegiatan di Pangururan sebaiknya dipandang sebagai tahap awal penguatan kapasitas, bukan titik akhir.

Dari sisi hasil analisis kelayakan di berbagai BUMDes, kriteria NPV, Net B/C, IRR, dan periode balik modal digunakan secara bersamaan untuk memperkuat kesimpulan, seperti pada kajian usaha minyak serai wangi di Kabupaten Rokan Hulu yang menyimpulkan kelayakan usaha dari nilai NPV positif, IRR di atas suku bunga acuan,

dan periode balik modal yang singkat (Jefri et al., 2021). Penggunaan lebih dari satu kriteria juga diajarkan kepada peserta agar tidak bergantung pada satu angka saja.

Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kegiatan dilaksanakan dalam satu hari sehingga waktu praktik terbatas. Kedua, simulasi menggunakan contoh ilustratif, bukan data riil setiap BUMDes. Ketiga, pengukuran capaian dilakukan secara deskriptif melalui observasi, belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terstandar. Keempat, belum ada pemantauan pascakegiatan untuk menilai apakah peserta menerapkan materi di BUMDes masing-masing. Keterbatasan ini menjadi dasar rekomendasi pendampingan lanjutan dan monitoring berkala

Implikasi bagi Pengelola dan Pemerintah Desa

Bagi pengelola BUMDes, kegiatan ini menegaskan bahwa kajian kelayakan sebaiknya dilakukan sebelum modal ditanamkan, bukan setelah usaha bermasalah, dan bahwa pencatatan rutin menghemat waktu ketika laporan harus disusun. Bagi pemerintah desa sebagai pemilik modal, hasil kegiatan ini menunjukkan perlunya meminta kajian kelayakan sebagai syarat penyertaan modal dan laporan keuangan berkala sebagai dasar pembinaan, sejalan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengaturan BUM Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2018; Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menunjukkan peluang kemitraan jangka panjang berupa klinik kelayakan usaha dan laporan keuangan

Dampak terhadap Perencanaan Usaha dan Akuntabilitas Pelaporan

Kegiatan ini berdampak pada kesadaran peserta mengenai pentingnya perencanaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, antara lain sebagai berikut.

1. Peserta memahami bahwa rencana unit usaha perlu dikaji dari aspek pasar, teknis, hukum, dan keuangan sebelum modal desa digunakan, sehingga risiko kerugian dapat dikurangi.
2. Peserta mengenal kriteria kelayakan investasi. Hasil perhitungan yang menunjukkan NPV positif, Net B/C di atas satu, dan modal kembali dalam umur usaha dapat menjadi dasar pertimbangan, sebagaimana digunakan dalam kajian kelayakan BUMDes lain (Jefri et al., 2021; Wardana et al., 2021).
3. Peserta memahami bahwa setiap transaksi harus dicatat berdasarkan bukti yang sah dan diolah menjadi informasi akuntansi, bukan hanya catatan kas.
4. Peserta memahami fungsi laporan keuangan dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat, termasuk dalam forum musyawarah desa (Nurhidayati et al., 2023).

Kendala Selama Pelaksanaan

Terdapat beberapa kendala. Pertama, kemampuan peserta berbeda-beda, baik dalam memahami istilah akuntansi seperti debit, kredit, dan jurnal, maupun dalam menggunakan perangkat digital. Kedua, tidak semua peserta membawa data usaha dan dokumen transaksi BUMDes masing-masing, sehingga sebagian praktik menggunakan contoh kasus dari pemateri. Ketiga, perhitungan kriteria kelayakan seperti NPV memerlukan pemahaman nilai waktu uang yang bagi sebagian peserta baru diperkenalkan. Kendala sejenis juga dilaporkan pada pendampingan BUMDes lain yang terbatas pada sumber daya manusia dan latar belakang pendidikan (Monoarfa et al., 2023; Yuliani et al., 2022).

Untuk mengatasinya, pemateri menerapkan pembelajaran bertahap: mulai dari konsep dasar, contoh sederhana, simulasi perhitungan, hingga praktik penyusunan laporan, disertai diskusi dan tanya jawab. Penjelasan istilah dilakukan berulang dengan bahasa yang sederhana.

Keterkaitan dengan Tata Kelola BUMDes

Kegiatan ini berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Transparansi tercermin dari dorongan agar pengelola mencatat transaksi dengan jelas dan menyimpan bukti transaksi. Akuntabilitas tercermin dari kemampuan menghubungkan setiap transaksi dengan akun, bukti pendukung, dan laporan. Keberlanjutan usaha diperkuat oleh kajian kelayakan yang membantu pengelola memilih unit usaha dengan risiko lebih rendah dan manfaat lebih jelas. Hal ini sejalan dengan arah pengaturan BUM Desa yang menempatkan perencanaan, pertanggungjawaban, dan pembinaan sebagai bagian dari tata kelola (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Pendampingan lanjutan berupa klinik kelayakan usaha dan laporan keuangan, agar masing - masing BUMDes dapat menyusun kajian untuk unit usaha riilnya.
2. Penyusunan panduan teknis sederhana yang memuat contoh perhitungan kelayakan, klasifikasi akun, format laporan keuangan, dan tata cara pengarsipan bukti transaksi, termasuk templat Excel sebagaimana digunakan pada pendampingan serupa (Wahyudi et al., 2022).
3. Pembiasaan pencatatan transaksi secara rutin, tidak menunggu akhir periode.
4. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pemerintah desa dan pembina terhadap kelengkapan dokumen dan konsistensi pelaporan.
5. Pembentukan forum komunikasi pengelola BUMDes di Kabupaten Samosir untuk berbagi pengalaman dan menyamakan pemahaman.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan analisis kelayakan usaha dan penyusunan laporan keuangan bagi pengelola BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, dan BUMDes Berkah Sialanguan Jaya berkontribusi meningkatkan kapasitas peserta. Peserta memahami aspek dan kriteria kelayakan usaha, persamaan dasar akuntansi, alur pencatatan dari bukti transaksi hingga laporan keuangan, serta pentingnya pengarsipan dokumen. Pendekatan tatap muka yang memadukan materi, simulasi, dan diskusi relevan dengan kebutuhan pengelola yang berlatar belakang beragam.

Pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar kemampuan tersebut diterapkan secara konsisten menggunakan data usaha masing-masing BUMDes. Monitoring berkala, panduan teknis sederhana, dan forum komunikasi pengelola diharapkan memperkuat kualitas perencanaan usaha dan pelaporan keuangan BUMDes secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes Marsahi Tahi, BUMDes Huta Bolon Mandiri, dan BUMDes Berkah Sialanguan Jaya, Serta Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Jefri, Y., Anthony, M., & Taryono, T. (2021). Analisis kelayakan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Yakin berdasarkan potensi desa di Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. JOM FEB, 8(2). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/32289

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Monoarfa, R., Noholo, S., & Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 2(2). https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio/article/download/60/48

Nurhidayati, dkk. (2023). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUM

Desa Berkah Sae Kedak Kediri. Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, 5(1). https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/KUAT/article/download/2167/1111

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623). https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914). https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Wahyudi, V. A., Mazmawan, M. Z., & Manshur, H. A. (2022). Pendampingan analisis kelayakan usaha rintisan teh celup rambut jagung Desa Sragi Kabupaten Blitar. Studi Kasus Inovasi Ekonomi, 6(1), 1–6. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/download/18395/10601/66209

Wardana, F. K., Qomaruddin, M., & Mas Soeroto, W. (2021). Analisis kelayakan investasi dengan pendekatan aspek financial dan strategi pemasaran pada program ayam petelur di BUM Desa Bumi Makmur. Sebatik, 25(2). https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/download/1633/526

Yuliani, R., Anwar, K., Yasin, M., & Rahman, M. (2022). Pelatihan dan bimbingan teknis BUMDESA Berkah Bersama Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul), 2(2), 352–361. https://doi.org/10.20527/ilung.v2i2; https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/ilung/article/download/6200/4383